Jurnal Ilmiah METADATA

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN ANALISIS
MENGENDAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PELAKU PENGELOLA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA
IZIN (Studi Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009)**

Novi Juli Rosani Zulkarnaen

Universitas Darma Agung, Medan

ABSTRAK

Tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara konsisten yaitu dengan pemberian sanksi berat sebagai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembuangan limbah B3 tanpa izin disebabkan pembuangan limbah yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dalam aktivitasnya, ternyata melakukan perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut jelas merugikan orang lain atau pihak lain dalam kepentingan lingkungan hidupnya termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan hidup tersebut terjadi penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya itu haruslah diukur dengan data-data teknis, gejala-gejala dan fakta-fakta yang dialami oleh lingkungan. Berdasarkan analisis data, maka diperoleh kesimpulan pertanggungjawaban pada pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup bertanggung jawab atas kegiatan produksi yang dengan sengaja dan melanggar undang-undang melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Dampak Lingkungan, Pelaku Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi sekarang ini, masalah yang paling populer dan yang banyak mendapat perhatian adalah masalah Hak Azasi Manusia (HAM), masalah lingkungan hidup dan masalah kependudukan.

Mengenai masalah lingkungan hidup salah satu penyebabnya adalah berkembangnya perusahaan industri. Disadari atau tidak perkembangan industri selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian yang mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, juga dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri yaitu dalam bentuk pencemaran lingkungan akibat dari limbah industri yang tidak dikelola dengan baik.

Perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar *dioxide* dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat.¹

Lingkungan tempat manusia itu hidup dapat dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yang menonjol yaitu :

1. Lingkungan fisik (*Phsical Environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.
2. Lingkungan biologis (*Biological Environment*) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri. Misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan.
3. Lingkungan sosial (*Social Environment*) yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman dan juga orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.²

Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena :

1. Alam
2. Perbuatan Manusia

Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya karena kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti

¹Syamsul Arifin., *Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Pencemar Lingkungan*, USU Press, Medan, 1998, h.3-4

²Fuad Amsyari., *Prinsip-Prinsip Masalah dan Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.11.

Jurnal Ilmiah METADATA

tanah longsor, banjir, karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.³

Tindakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara konsisten yaitu dengan pemberian sanksi berat sebagai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Proses penyelesaian penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah 'sistem peradilan pidana' (*Criminal Justice System*) yang meliputi empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, dimana diantara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling terkait. Bekerjanya sistem peradilan pidana ini dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana.⁵ Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

³P. Joko Subagio., *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, h.22-23.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.⁶ Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁸

Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 155

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, melalui <http://www.kompas.wordpress.com> diakses tanggal 04 Mei 2013

Jurnal Ilmiah METADATA

3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹¹

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. Korporasi diakui sebagai subjek hukum di samping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus diciptakan agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.¹²

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu untuk menentukan badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan.

Setiyono menyebutkan korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.156

¹¹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 68

¹² Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 160.

bahasa Belanda disebut *rehtpersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pada dasarnya setiap pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Dampak pembangunan ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan perlu disertai dengan wawasan jauh ke depan tentang perkiraan timbulnya dampak tersebut. Wawasan ini diterapkan dengan mengadakan analisis perkiraan dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Analisis tersebut harus dilakukan secara terperinci tentang dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul, sehingga sejak dini dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangnya.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Emil Salim definisi umum tentang Amdal itu adalah : “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan”.²³

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

¹³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h.2

²³ Emil Salim., *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1992, h.6

Jurnal Ilmiah METADATA

- b. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- c. Luas wilayah penyebaran dampak.
- d. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
- e. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
- f. Sifat kumulatif dampak.
- g. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- h. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati.
8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pembangunan diperlukan untuk mengatasi banyak masalah, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan, pembangunan mempunyai dampak negatif. Dengan adanya dampak negatif tersebut, haruslah waspada. Pada satu pihak tidak boleh takut untuk melakukan pembangunan,

Jurnal Ilmiah METADATA

karena tanpa pembangunan tingkat kesejahteraan akan terus merosot, pada lain pihak harus memperhitungkan dampak negatif dan berusaha untuk menekannya menjadi sekecil-kecilnya. Pembangunan itu harus berwawasan lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan salah satu alat dalam upaya dilakukannya pembangunan berwawasan lingkungan.

Kegunaan AMDAL, khususnya dalam usaha menjaga kualitas lingkungan adalah:

- a. Mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.
- b. Menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan-pertentangan.
- c. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran, misalnya timbulnya pencemaran air, udara, tanah, kebisingan dan sebagainya sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
- d. Agar dapat diketahui manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.²⁴

Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah keseluruhan dokumen studi kelayakan lingkungan yang terdiri dari kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Dari pengertian tersebut Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) hanya merupakan salah satu dokumen dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, keseluruhan yang terdapat dalam AMDAL harus dilaksanakan secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Jadi istilah AMDAL dibedakan dengan ANDAL, yaitu AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi kelima buah dokumen, yaitu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana

²⁴ *Ibid*, h.15

Jurnal Ilmiah METADATA

Pengelolaan Lingkungan (RPL). Sedangkan ANDAL yaitu Analisis Dampak Lingkungan merupakan salah satu dokumen yang dibuat dalam proses tersebut.

Prinsip dalam penerapan dan tata laksana Amdal adalah :

a. Prinsip Dalam Penerapan AMDAL

Dalam Peraturan penerapan AMDAL tercermin beberapa prinsip yang dianut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Dalam prinsip ini mengandung pengertian bahwa dampak lingkungan yang harus dipertimbangkan mencakup semua aspek lingkungan, baik biofisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang relevan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mempertimbangkan dampak rencana kegiatan dalam lingkungan hidup diperlukan pengaturan mengenai prosedur administratif.

- 2) AMDAL merupakan instrumen pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari perencanaan

Sebagai instrumen pengambilan keputusan, AMDAL dapat memperluas wawasan pengambilan keputusan sehingga dapat diambil keputusan yang paling optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Sebagai konsekuensi kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka menjadi kewajiban pemrakarsa untuk memikul biaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan rencana kegiatannya.

- b. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Seorang pemrakarsa memerlukan kepastian bahwa untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakannya itu perlu atau tidak perlu dilengkapi

Jurnal Ilmiah METADATA

dengan AMDAL. Kepastian ini diperlukan berkenaan dengan perbedaan prosedur yang harus ditempuh oleh pemrakarsa. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai konsekwensi bahwa kriteria dan prosedur itu mengikat baik bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan kegiatan maupun instansi yang bertanggung jawab dalam menilai dan mengambil keputusan atas AMDAL. Tidak ditaatinya kriteria dan prosedur tersebut dapat menjadi dasar gugatan terhadap keputusan pemberian ijin pelaksanaan rencana kegiatan oleh pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan bagi pihak instansi yang berwenang tidak ditaatinya kriteria dan prosedur tersebut merupakan dasar bagi instansi yang berwenang untuk menolak permohonan izin bagi izin pelaksanaan kegiatan.

- c. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak. Prinsip ini berarti :
 - 1) Bahwa semua aspek lingkungan dan berbagai kepentingan yang terkait harus didudukan secara serasi dan dipertimbangkan secara imbang.
 - 2) Nahwa semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan harus diberi hak dan kesempatan yang sama dalam proses penilaian substansi AMDAL.
 - 3) Pengambilan keputusan harus didasarkan pada cara yang menjamin objektivitas.
- d. AMDAL bersifat terbuka, kecuali yang menyangkut rahasia negara. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana secara baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti pula, bahwa hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap keadaan dan kondisi lingkungan hidup.

Jurnal Ilmiah METADATA

- e. Keputusan tentang AMDAL harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan keputusan.
Keputusan tertulis memberikan jaminan kepastian mengenai substansi keputusan tersebut. Jaminan kepastian ini penting bagi :
- 1) Pemrakarsa : dengan keputusan tertulis dia mengetahui secara pasti tentang syarat dan kewajiban yang harus dia penuhi dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatannya, dan apabila keputusan ini bersifat merugikan kepentingannya keputusan itu dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan banding atau gugatan tata usaha negara.
 - 2) Pejabat : yang mengeluarkan keputusan itu : keputusan itu menjadi pegangan untuk menilai apakah pemrakarsa menaati syarat dan kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan, maka keputusan itu menjadi dasar untuk diambilnya tindakan hukum administratif terhadap pemrakarsa.
 - 3) Penegak hukum : keputusan tertulis itu dapat menjadi sumber untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan si pemrakarsa, dan bahan dalam rangka penyidikan perkara pidana.
 - 4) Warga masyarakat : keputusan itu dapat dipakai sebagai dasar gugatan apabila pelanggaran yang dilakukan pemrakarsa terhadap keputusan itu menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- f. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah disetujui harus dipantau.
Pemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi akibat dilaksanakan rencana kegiatan. Hasil pemantauan perubahan lingkungan dan evaluasi hasilnya merupakan bahan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik nasional maupun internasional.
- g. Penerapan AMDAL dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas. AMDAL merupakan suatu instrumen kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuju ke arah tercapainya suatu tujuan, yaitu tetap terpeliharanya kemampuan

lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, AMDAL harus selalu mengacu kepada kebijaksanaan nasional.

- h. Untuk menerapkan AMDAL sangat tergantung kepada aparat-aparat yang memadai.

Keberhasilan penerapan AMDAL sangat bergantung kepada kemampuan aparat pelaksanaannya, baik aparat administrasi, pemerintah maupun penyusun AMDAL.²⁵

G. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3 Tanpa Izin

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan tanpa bahan limbah. Artinya dalam melakukan aktivitasnya perusahaan menghasilkan produk-produk samping berupa limbah dan bahan-bahan buangan berbahaya lainnya sebagai akibat dari proses yang dijalankan.

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan atau pencemaran diantaranya adalah :

1. Akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi manusia dan atau badan hukum.
2. Terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi manusia dan atau badan hukum.
3. Terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya).³²

Limbah dan bahan buangan lainnya adalah bahan yang sudah tidak bisa lagi diproses untuk dimanfaatkan secara ekonomis melakukan teknologi yang dipunyai yang mendominasi kegiatan perusahaan yang tidak ingin mengelola limbah atau bahan buangan lainnya dan langsung mencari cara semurah mungkin untuk membuangnya, dengan mencampakkan limbah ke lingkungan sekitar sehingga pencemaran lingkungan tidak dapat dihindarkan.

Dengan demikian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan terjadi karena ada limbah yang keluar dari perusahaan melalui udara, air atau benda pada lainnya yang mengandung bahan berbahaya, kemudian lepas

²⁵ Syamsul Arifin., *Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*, USU, Medan, 2000, h.56

³² Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. h.76

Jurnal Ilmiah METADATA

masuk lingkungan sehingga terjadi perubahan kualitas lingkungan. Bahan pencemaran tersebut akan bereaksi dengan satu atau lebih komponen lainnya yang apabila sampai pada kondisi tertentu, melebihi daya dukung lingkungan akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana peruntukannya.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan atau tercemar. Artinya, penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya itu haruslah diukur dengan data-data teknis, gejala-gejala dan fakta-fakta yang dialami oleh lingkungan.

Hal ini dapat diketahui melalui nilai ambang batas yang ditentukan pada setiap lingkungan berdasarkan sistem baku mutu lingkungan. Jadi baku mutu lingkungan dalam hal pencemaran lingkungan ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk melihat seberapa jauh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Apabila penyimpangan telah melewati nilai ambang batas yang diperbolehkan terdapat di dalam lingkungan, maka lingkungan itu telah mengalami pencemaran.

Untuk itulah setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Tujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah untuk memastikan bahwa pembangunan suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan bermanfaat dan tidak mengorbankan lingkungan hidup.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan lingkungan hidup di Indonesia sudah lebih maju karena telah menetapkan asas-asas pokok bagi pengelolaannya. Salah satu asas pokok dalam undang-undang tersebut adalah

Jurnal Ilmiah METADATA

tentang perlunya diterapkan sistem analisis dampak lingkungan sebagai bagian perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sebagai kajian kelayakan lingkungan suatu rencana usaha atau kegiatan yang prosesnya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sangat berguna bagi :

1. Pemerintah
 - a. Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan
 - b. Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah
 - c. Untuk mencegah agar potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Masyarakat
 - a. Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi
 - b. Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kegunaan akibat adanya suatu kegiatan
 - c. Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.
3. Pemrakarsa
 - a. Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.
 - b. Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek
 - c. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Secara umum kegunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah :

1. Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
2. Menampung aspirasi, pengetahuan, dan pendapat penduduk, khususnya dalam masalah lingkungan akan didirikannya rencana usaha tersebut.

Jurnal Ilmiah METADATA

3. Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Melalui partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), diharapkan dimasa mendatang masyarakat juga akan turut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha atau kegiatan.

Dokumen dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terdiri dari :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

Dokumen ini memuat ruang lingkup dan kedalaman kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses pelingkupan.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dokumen ini memuat telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KA-ANDAL.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha atau kegiatan.

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Dokumen ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang telah dikelola akibat terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha atau kegiatan.

Pendekatan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang tepat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil kajian serta untuk mengefisienkan proses pelaksanaannya. Artinya suatu jenis rencana usaha atau kegiatan akan dapat diproses dalam waktu jauh lebih singkat dan menyeluruh bila

menggunakan pendekatan yang tepat, dibandingkan dengan apabila menggunakan pendekatan yang lain.

H. Pertanggungjawaban Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Jika Terjadi Pencemaran dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Dalam literatur ilmu hukum pidana, ada berbagai istilah bagi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di bidang lingkungan hidup. Diantaranya tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kejahatan di bidang lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), tidak terdapat rumusan yang mutlak tentang tindak pidana lingkungan hidup tersebut.

Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*). Selain itu, Bukan saja tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun seluruh tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.

Lingkungan hidup, dikenal sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan seperti layaknya manusia alamiah, yang mempertanggungjawabkan itu adalah orang-orang sebagai pengurus korporasi itu sendiri. Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus dan atau pegawai yang melaksanakan pekerjaannya atas nama korporasi.
2. Pertanggung jawaban dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi secara langsung atau pun tidak langsung.
3. Motif tindak kejahatan korporasi untuk mencapai kebutuhan, keuntungan dan tujuan korporasi.
4. Tindak kejahatan korporasi terkait ke dalam bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.
5. Beban pembuktian dan sangsi memiliki karakteristik khusus.³³

³³ Abdurrahman, *Op.Cit*, 87

Jurnal Ilmiah METADATA

KUH Pidana juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.³⁴

Secara yuridis terhadap Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang Jadi, dasar pemikiran yang digunakan oleh KUH Pidana itu adalah bahwa kejahatan tidak dapat dilakukan oleh sebuah korporasi, karena walaupun tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi tindak pidana tetap dilakukan oleh orang persorangan atau legal persoon.

Perlu diketahui, bahwa seseorang atau badan hukum atau suatu korporasi yang melakukan kejahatan dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu tindakan yang merupakan mala in se atau perbuatan yang merupakan mala in prohibita. Tindakan yang termasuk mala in se, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang merupakan mala in prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya aturan-aturan lalu lintas.³⁵

Mengenai hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai *lex spesialis*, bukan merupakan suatu penyimpangan asas akan tetapi merupakan penyempurnaan terhadap asas umum, sebab kejahatan di bidang lingkungan hidup tersebut saat ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra oridnary crime*) sehingga Selain dari pada korporasi yang diatur sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan, juga diatur hal-hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban mutlak, dimana bahwa pertanggungjawaban mutlak ini tidak diatur di dalam KUH Pidana sebagai *lex generalis*. Karena hukum pidana masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggungjawaban tanpa

³⁴ *Ibid*, h.89

³⁵ *Ibid*, h.92

Jurnal Ilmiah METADATA

kesalahan. Jadi, kesalahan di dalam hukum lingkungan tidak mesti harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan si pembuat.

Tindak pidana lingkungan hidup, mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja. Definisi tindak pidana lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat ditemukan secara lengkap. Namun dapat dirujuk kepada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa, “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan jelas dapat dipidana. Oleh sebab itu, maka tepatlah jika disamakan antara tindak pidana sama saja dengan kejahatan.

Subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pada Pasal 1 angka 32 yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum maksudnya adalah korporasi.³⁹ Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Kemudian dapat diambil lagi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Jurnal Ilmiah METADATA

2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembuangan limbah B3 tanpa izin disebabkan pembuangan limbah yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dalam aktivitasnya, ternyata melakukan perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut jelas merugikan orang lain atau pihak lain dalam kepentingan lingkungan hidupnya termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan hidup tersebut terjadi penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya itu haruslah diukur dengan data-data teknis, gejala-gejala dan fakta-fakta yang dialami oleh lingkungan.

Pertanggungjawaban pada pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin jika terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup bertanggung jawab atas kegiatan produksi yang dengan sengaja dan melanggar undang-undang melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya

Jurnal Ilmiah METADATA

atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1993.

Alvi Syahrin., *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Medan, 2009.

Abdurrahman., *Pengembangan Asas dan Sistim Hukum Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Emil Salim., *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1992.

EY. Kanter dan SR. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002

Fuad Amsyari., *Prinsip-Prinsip Masalah dan Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Koesnadi Hardjasoemantri., *Hukum Tata Lingkungan*, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta, 1999

Leden Marpaung., *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

-----; *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991

Jurnal Ilmiah METADATA

M. Hamdan., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Madju, Bandung, 2000.

Moelyatno., *KUH. Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

-----; *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

P. Joko Subagio., *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Rachadi Usman., *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Siti Sundari Rangkuti, *Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Syamsul Arifin., *Sanksi Pidana Terhadap Badan Hukum Pencemar Lingkungan*, USU Press, Medan, 1998

-----, *Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Yang berwawasan Lingkungan*, USU, Medan, 2000

-----, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, FH.USU, Medan, 1993

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Karya Anda, Surabaya, 1992.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Internet

Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, melalui <http://www.kompas.wordpress.com> diakses tanggal 04 Mei 2013